

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Ismunarso, Djoko Prakoso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Amir Martosedono. 1994. *Praperadilan*. Semarang : Dahara Prize. Cet. III
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anggara, dkk. 2014. *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Darwan Prints. 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gunawan Setiadirdja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Ke-5, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang : 2004.
- M. Mawran, SH., Jimmy P. SH., 2009, *Kamus Hukum* (Dictionary Complete Edition), Surabaya : Realite Publisher.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat),(Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta :2010).
- Mochamad Anwar, 1989. *Praperadilan*, Jakarta : Ind-Hil-Co.
- O.C. Kaligis, 2009, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soeparmono, 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.

Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Kriminologi UI.

Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press.

2. Jurnal

Hikmoro, Abi. “*Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*”. Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013.

Mujiyono, Agus Sri. “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009.

Putri, Novita Akria. “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan*”. Skripsi. Jakarta : UIN Syari Hidayatullah 2015.

Napitupulu, Rizki Ananda. “*Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi*”. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung 2016.

3. Internet

<http://info.bisnis.com/read/20150225/285/406131/kpk-vs-polri-tiga-alasan-ma-perlu-menguji-praperadilan-budi-gunawan>

<http://indoprogress.com/2015/02/ketika-sarpin-kelewatan-batas-tentang-putusan-praperadilan-budi-gunawan/>,

<http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.; Februari 2015,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2016.

4. Peraturan Perundangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014